

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Kadir, Muhammad, 2010, *Hukum Perdata Indoensia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ali, Achmad, 1996, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Chandra Pratama, Jakarta.
- Atiyah, 1983, *The Law of Contract*, Clarendon Press, London.
- Badrulzaman, Maryam Darus, 1991, *Crediet Verband, Gadai dan Vidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Budiono, Herlien, 2012, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Fransworth, E. Allan, 1995, *Cases and Materials on Contracts*, The Foundation Press, New York.
- Hadjon, Philipus M., 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- \_\_\_\_\_, 1993, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Huijbers, Theo, 2007, *Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah*, Cetakan Keempatbelas, Kanisius, Yogyakarta.
- Mahdi, Sri Soesilowati, *et. al*, 2005, *Hukum Perdata (Suatu Pengantar)*, Gitama Jaya Jakarta, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 1985, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty,  
Yogyakarta.

\_\_\_\_\_, 2009, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*,  
Liberty, Yogyakarta.

\_\_\_\_\_, 2010, *Mengenal Hukum*, Penerbit: Universitas Atma  
Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Miru, Ahmadi, 2007, *Hukum Kontrak, Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers,  
Jakarta.

Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, 2004, *Perikatan yang Lahir dari  
Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Mustafa, Bachsan, 2001, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Citra  
Aditya Bhakti, Bandung.

Patrik, Purwahid, 1986, *Asas Itikad Baik dan Kepatutan dalam  
Perjanjian*, Badan Penerbit Undip, Semarang.

\_\_\_\_\_, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju,  
Bandung.

Prodjokoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.

Raharjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Satriyo, J., 1992, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Setiawan, I Ketut Oka, 2018, *Hukum Perikatan*, Sinat Grafika, Jakarta.

Setiawan, R., 1987, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, Bina Cipta,  
Bandung.

- Sjahdeni, Sutan Remy, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Hukum yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*, Institute Bankir Indonesia, Jakarta.
- Subekti, R., 1997, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta.
- Suyono, Capt. R.P., 2005, *Shipping Pengangkutan Intermoda Ekspor Impor Melalui Laut*, Penerbit PPM, Jakarta.
- Syaifuddin, Muhammad, 2012, *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Mandar Maju, Bandung.
- Tengker, F., 1999, *Perikatan*, Mandar Maju, Bandung.
- Triatmodjo, Bambang, 2016, *Pelabuhan*, Beta Offset, Yogyakarta.

## B. Jurnal

- Ayhan, Taha, 2010, "The Principle of Legal Certainty in EU Case Law," *Toddae's Review of Public Administration*, Vol.4, No.3.
- Khairandy, Ridwan, 2000, *Jurnal Hukum: Kewenangan Hakim untuk Melakukan Intervensi terhadap Kewajiban Kontraktual Berdasarkan Asas Iktikad Baik*.
- Silalahi, M. Udin, 2003, "Dasar Hukum Obligation To Contract", *Artikel, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 22, No. 2*.

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849).

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Nomor 151 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5070).

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2017 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (Berita Negara Nomor 394 Tahun 2017).

Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor HK.103/3/11/DJPL-15 tanggal 23 September 2015 tentang Tata Cara Pelayanan Kapal dan Barang Menggunakan *Inaportnet* di Pelabuhan.

Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM.003/87/17/DJPL-16 tanggal 24 November 2016 tentang Acuan Standar Pelayanan (*Service Level Standard/SLS*) Menggunakan *Inaportnet* Untuk Pelayanan Kapal dan Barang di Pelabuhan.

Peraturan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Nomor  
UM.008/36/4/OP.TPK-18 tentang Standar Kinerja Pelayanan  
Operasional Pelabuhan pada Pelabuhan Tanjung Priok.

Keputusan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Nomor  
UM.008/27/8/OP.TPK-18 tanggal 2 Oktober 2018 tentang Standar  
Operasional Prosedur Pelayanan Kapal dan Barang melalui Sistem  
*Inaportnet* pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor Register 3641K/Pdt/2001 tanggal  
11 September 2002.

General Port Regulation of The Philippine Ports Authority.

#### **D. Internet**

Anto, “Penataan TUKS untuk Kepastian Hukum dan Dorong Investasi”,  
[https://oceanweek.co.id/penataan-tuks-untuk-kepastian-hukum-  
dorong-investasi/](https://oceanweek.co.id/penataan-tuks-untuk-kepastian-hukum-dorong-investasi/), diakses pada tanggal 5 Desember 2018.

Rosa Agustina T Pangaribuan, 2000, *Asas kebebasan Berkontral dan Batas-  
Batasannya dalam Hukum Perjanjian*, [www.theceli.com](http://www.theceli.com), di akses pada  
tanggal 12 Desember 2018.